

# Tren E-Government di Dunia Pasca Pandemi Covid-19

Author : Sherlly Rossa

Editor : Iradat Wirid



Pandemi Covid-19 mendorong pengembangan teknologi digital untuk mendukung penyediaan pelayanan publik baik di sektor kesehatan, pendidikan, hingga keamanan.

Apalagi kondisi yang mengharuskan pelayanan dengan menjaga jarak semakin mendesak pemerintah untuk melakukan inovasi pada pelayanan mereka yang terbatas. Pandemi telah memperkuat basis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* sebagai wadah interaksi dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, bagaimana tren perkembangan *E-Government* pasca pandemi?

Tulisan ini mencoba mengulik tren keberlanjutan *E-Government* berdasarkan laporan "*United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*". Data perkembangan *E-Government* pada tahun 2022 dianalisis berdasarkan penilaian *E-Government Development Index* (EGDI). Selain itu, bagian ini juga memaparkan presentasi singkat mengenai pemeringkatan *E-Government* pada 193 negara anggota PBB berdasarkan empat kelompok nilai EGDI. Adapun keempat kelompok nilai EGDI meliputi kelompok nilai sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi terkini negara tersebut. Analisis tersebut dilengkapi dengan studi kasus dari UN DESA (*United Nations Department of Economic and Social Affairs*) yang dilakukan pada tahun 2021 dengan metodologi analisis jaringan. Terdapat lebih dari 500 indikator pembangunan untuk menetapkan pola pembangunan digital dari pengelompokan negara-negara dengan karakteristik serupa.

*E-Government* adalah bentuk dari adaptasi perubahan dan perkembangan teknologi dunia. Peningkatan pelayanan yang fleksibel mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Adapun layanan yang diberikan menjadi lebih transparan dan efektif bagi masyarakat dan instansi terkait untuk mengakses informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Terdapat tiga kelebihan penerapan sistem *E-Government* (Hendriyaldi dkk, 2022; Rahmadany, 2021) yaitu *pertama*, pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai upaya menjaga imunitas kesehatan dengan meminimalisasi kontak fisik. *Kedua*, *Work from Home* (WFH) sebagai alternatif peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan media telekonferensi dan pelayanan berbasis elektronik (*e-services*). *Ketiga*, *E-Government* sebagai strategi meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan inovasi teknologi dalam sistem birokrasi.

## Data Survei E-Government

Survei tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tren global dalam pengembangan dan transisi *E-Government* di berbagai negara dengan EGDl tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Negara-negara anggota PBB dengan nilai EGDl tinggi menjadi bagian terbesar sebanyak 38 persen; nilai EGDl sangat tinggi 31 persen; dan nilai EGDl menengah 27 persen. Adapun negara dengan nilai EGDl rendah hampir sama dengan tahun 2020 sebanyak 4 persen (lihat gambar 1).



Source: 2022 United Nations E-Government Survey.

Gambar 1. Jumlah dan Proporsi Negara dalam Setiap Pengelompokan EGDl tahun 2020 dan 2022

### Tingkat EDGI Negara dan Klasifikasi Kuartil

## 15 Negara

dalam kelas peringkat EGDl sangat tinggi dengan skor **0,89 hingga 0,97**



Denmark



Finlandia



Rep. Korea



Selandia Baru



Swedia



Australia



Estonia



Belanda



Amerika Serikat



Inggris



Islandia



Singapura



Uni Emirat Arab



Jepang



Malta



73

Negara dalam  
kelas peringkat  
EGDI tinggi

24

di Amerika

8

di Eropa

22

di Asia

3

di Oseania

16

di Afrika

53

Negara dalam  
kelas peringkat  
EGDI menengah



32

di Afrika

10

di Oseania

10

di Asia

1

di Amerika

## 8 Negara

dalam kelas peringkat EGDI menengah  
dengan skor di bawah 0,25



Rep. Afrika Tengah



Chad



Eritrea



Somalia



Sudan Selatan



Nigeria



Guinea Bissau



Korea Utara

Selain itu, penilaian *E-Government* tahun 2022 menunjukkan keterkaitan antara tingkat pendapatan negara dengan nilai EGDI yang berbanding lurus. Rata-rata negara yang berpendapatan tinggi cenderung mempunyai nilai EGDI yang tinggi, begitupun sebaliknya. Data menunjukkan hampir 90 persen dari 99 negara anggota dengan nilai EGDI di atas rata-rata berada dalam kelompok berpendapatan tinggi sementara 10 persen lainnya merupakan negara berpendapatan menengah ke bawah.





## Upaya Peningkatan Kualitas EGD

Terjadi peningkatan sebesar 16,7 persen jumlah negara yang menyediakan setidaknya 1 dari 22 layanan online secara global. Terdapat lebih dari 16 layanan yang ditawarkan pada 61 persen negara anggota. Dengan demikian, terbaca tren digitalisasi layanan pemerintah yang memberikan fasilitas untuk menyelesaikan segala jenis transaksi secara online. Lebih dari seperempat negara anggota telah mengintegrasikan fungsi chatbot berkemampuan AI pada portal mereka. Adapun untuk meningkatkan kualitas EGD dapat dilakukan beberapa hal berikut:

- Prioritas layanan digitalisasi yang paling sering ditawarkan mulai dari melamar lowongan pemerintah dan izin usaha; permohonan akta kelahiran, kematian, dan pernikahan; serta pembayaran tagihan listrik;
- Penguatan strategi pemerintahan elektronik melalui undang-undang keamanan siber yang mencakup perlindungan data pribadi dan data terbuka pemerintah.
- Upaya aktif pemerintah melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik secara elektronik mengenai isu-isu kebijakan.

## Referensi

- Hendriyaldi, H., Erida, E., & Yanti, O. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 669-682.
- Rahmadany, A. F. (2021). Implementasi Pelayanan Publik berbasis Electronic Government dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 118-125.
- UN E-Government Survey 2022 | Desa Publications (2022) United Nations. Tersedia di: <https://desapublications.un.org/publications/un-e-government-survey-2022> (Diakses pada 24 May 2024).

